

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Pada dasarnya Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja juga dijadikan acuan SKPD dalam rangka pencapaian target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu, Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2018 ini merupakan dokumen rencana kerja tahun ke 3 pelaksanaan Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021, dengan visi JAMBI TUNTAS 2021.

Dalam penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2018, berbagai aspek terkait dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan di tahun mendatang, diantaranya isu strategis nasional, regional atau wilayah maupun serta isu-isu yang berkembang di daerah, yang selanjutnya di kombinasikan secara terintegrasi ke dalam suatu perencanaan yang terukur, terarah dan realistis.

## 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada APBD Tahun 2018.

Oleh karenanya, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2018, secara garis besar dimaksudkan untuk :

- 1) Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 2) Menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui perencanaan tahunan yang lebih responsif guna menyelaraskan pelaksanaan program yang telah dilakukan sebelumnya dan berupaya untuk meningkatkan pencapaiannya pada tahun pelaksanaan

Renja 2018, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi.

- 3) Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk merealisasikan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) yang akan ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

## **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2018, meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2. Program dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu atau tahun sebelumnya, ditujukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Rencana Kerja yang mampu direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dengan membandingkan antara target/rencana yang ingin dicapai dengan pencapaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

##### a. Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016

Sebagai bagian dari pembangunan daerah, bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenagakerjaan berusaha melalui berbagai kebijakan.

Berdasarkan *review* selama tahun 2016, menunjukan bahwa telah terjadi dinamika perubahan pada sektor ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, secara umum dapat digambarkan bahwa angkatan kerja pada Agustus 2016 sebanyak 1.692 juta orang, dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 67,7 ribu orang atau 4% adalah penduduk yang menganggur, dan berdasarkan data yang kami himpun dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebanyak 12.292 orang jumlah pencari kerja yang terdaftar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, sementara jumlah



lowongan kerja sebanyak 5.163 orang. Sampai dengan posisi Oktober 2016 terdapat sebanyak 2.857 orang tenaga kerja telah terserap di beberapa sektor dunia usaha, baik formal maupun informal, atau kurang lebih 55,8% telah terserap dari jumlah lowongan kerja yang tersedia.

Sementara itu, jumlah TKA yang bekerja di Provinsi Jambi sampai dengan bulan Nopember 2016 sebanyak **146** orang atau bekerja di sebanyak **34** perusahaan yang tersebar di Provinsi Jambi. Sedangkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Negara Malaysia sebanyak 233 orang, yang berasal dari 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci sebanyak 195 orang dan dari Kota Sungai Penuh sebanyak 38 orang. Dari data yang terima bahwa jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Provinsi Jambi yang masih aktif sebanyak 11 PPTKIS.

Selain itu melalui program kerjasama magang TKI Perawat/Perawat Lansia ke Jepang, pada tahun 2016 Provinsi Jambi sudah mengirimkan utusan sebanyak 7 orang tenaga perawat ke Jakarta untuk mengikuti proses seleksi akhir sebelum diberangkatkan ke negara Sakura.

#### **b. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp.3.665.067.600,- dengan realisasi Rp.3.112.949.170,- (84,94%) dengan realisasi fisik 100%, untuk mendanai 3 program yaitu: 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2) Program peningkatan kesempatan Kerja dan 3) program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah berdampak pada penurunan jumlah

pengangguran dari 45.947 orang pada tahun 2015 turun menjadi 39.270 orang pada tahun 2016.

### 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Outcome dari program ini adalah meningkatnya kualitas, produktivitas dan kuantitas tenaga kerja/calon tenaga kerja atau pencari kerja pada berbagai bidang keterampilan. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.2.003.090.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.812.376.990,- (90,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 90.45 %. Untuk mewujudkan sasaran program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja dengan total anggaran Rp.550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.420.281.700,- (76,41%) realisasi fisik 80,00 %. Output dari kegiatan ini antara lain terlatihnya 256 orang. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan bagi seluruh peserta latih sehingga memiliki bekal keterampilan yang memadai untuk bersaing pada pasar kerja, baik pasar kerja formal maupun untuk membuka lapangan usaha sendiri secara mandiri.
- 2) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif dengan dana sebesar Rp.497.000.000,- dengan realisasi Rp.189.179.600,- (98,43 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber/instruktur, belanja ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transport, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output kegiatan terlaksananya pelatihan kewirausahaan produktif bagi 180 orang masing-masing di Kabupaten

Batang Hari, Tanjab Barat , Muaro Jambi, Kota Jambi, Sarolangun, Tebo, Kerinci, Merangin. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas wirausahawan dalam menjalankan usahanya serta mendorong minat masyarakat menjadi pengusaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

- 3) Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dengan total dana sebesar Rp.224.249.000,- dan terealisasi sebesar Rp.224.177.000,- (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran pada kegiatan ini antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transport, makan-minum dan perjalanan dinas sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kerjasama pelatihan antara Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi dengan peserta dari LPKS dengan total jam pelatihan (3 Paket @240 jam), Sasaran (outcome) yang ingin dicapai adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan bidang keterampilan sesuai kejuruan masing-masing 1. Kegiatan menjahit, 2. Kegiatan operator komputer, 3. Teknisi HP, 4. Salon/Tatarias sebanyak 96 orang.
- 4) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas tenaga kerja dengan dana sebesar Rp.219.600.000,- dengan realisasi Rp.185.440.000,- (84,44%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Pos anggaran pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlatihnya peserta sebanyak 80 orang tentang peningkatan produktivitas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas perusahaan masyarakat menjadi pengusaha yang handal, mampu dan menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

- 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dengan dana sebesar Rp.349.141.000,- dengan realisasi Rp. 331.638.000,- (94,99%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis masyarakat bagi tenaga kerja sebagai dukungan anggaran daerah dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis masyarakat yang meliputi magang ke perusahaan dan magang ke Jepang sebanyak 650 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman, pengetahuan dan kesiapan calon tenaga kerja yang berbasis masyarakat.
- 6) Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dengan total anggaran Rp.163.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.161.660.690,- (99,12%) realisasi fisik 100 %. Output dari kegiatan ini antara lain terlatihnya 256 orang. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan bagi seluruh peserta latih sehingga memiliki bekal keterampilan yang memadai untuk bersaing pada pasar kerja, baik pasar kerja di Dalam dan Luar Negeri. Peserta magang ke Jepang sebanyak 52 Orang masih dalam tahap seleksi medical check up.

## 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh; Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Penggunaan TKA;Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan;Kegiatan

Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; Kegiatan Penyusunan Program, RTKD dan Analisa keberhasilan program dan penyusunan profil Ketenagakerjaan; Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI Ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri; dan Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK).

Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Total dana yang disediakan untuk Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebesar Rp.1.066.977.600,- dengan realisasi Rp.969.630.932,- (90,88%) dengan realisasi fisik 100 % untuk mendanai kegiatan.

- 1) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB) dengan total dana sebesar Rp.220.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 216.616.750,- (98,45%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber, ATK, biaya makan-minum pertemuan, serta bantuan barang kepada kelompok usaha bersama (WUB) sebanyak 40 orang masing-masing digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan wirousahanya agar mampu berkembang dengan baik, dengan output terlaksananya pemberian bantuan bimbingan manajemen dan bantuan kepada WUB.
- 2) Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar negeri, penyuluhan penempatan CTKI/TKI ke Luar Negeri, Monitoring dan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor informal, Pendataan dan Monitoring pengendalian pengguna Tenaga Kerja Asing dengan total dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 67.030.750,- (83,79%) dan realisasi fisik 83,79 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk ATK, biaya makan minum, narasumber, dengan output terlaksananya

penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL,AKAD,TKI sebanyak 2.500 orang, penyuluhan penempatan calon TKI keluar negeri dan pengendalian penggunaan TKA, ATK, makan minum dll. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengangguran serta tersedianya data TKA yang bekerja di Provinsi Jambi.

- 3) Kegiatan Penyuluhan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri dengan total dana sebesar Rp.126.722.200,- dengan realisasi dana Rp. 126.522.200,- (99,84%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk ATK, biaya makan minum, narasumber, dan perjalanan dinas, dengan output Jumlah CTKI yang memperoleh penyuluhan penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke Jepang (Mahasiswa Tingkat Akhir Akper 345 org, 6 Akper di 3 Kab/Kota). Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.
- 4) Monitoring Pengendalian Tenaga kerja Asing dan penyusunan Pergub Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2014 dengan total dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 66.479.730,- (83,10%) dan realisasi fisik 85,33 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk ATK, biaya makan minum, dan perjalanan dinas, dengan output Jumlah peluang kesempatan kerja sektoral yang termonitor dalam menanggulangi pengangguran. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Peningkatan PAD dan Perpanjangan IMTA.
- 5) Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dengan total dana sebesar Rp.117.450.000,- dengan realisasi dana Rp. 117.448.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber, ATK, biaya makan-minum pertemuan,

sosialisasi peraturan Perundang-undangan, dengan output Jumlah data Tenaga Kerja Pemuda yang Mandiri dan Profesional. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya Tenaga Kerja Pemuda yang Mandiri dan Profesional di Masyarakat.

- 6) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan dana Rp.60.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.179.600,- (86,97%), realisasi fisik 86,97%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk sosialisasi peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan jumlah peserta 50 perusahaan dengan narasumber dari Direktorat PTA Kementerian Nakertrans RI. Peserta berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi serta dari Dinas Kabupaten/Kota, dengan output tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dibidang penempatan kepada 60 perusahaan dan Petugas Kab/Kota pada tahun 2015. Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain untuk uang transport, Uang Saku peserta, Konsumsi, Honor dan Transport Narasumber pusat, ATK. Sasara (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman terhadap peraturan tersebut yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran.
- 7) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor formal dan Informal dengan total dana sebesar Rp.44.800.000,- dengan realisasi dana Rp. 33.839.500,- (88,51%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber, ATK, biaya makan-minum pertemuan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini jumlah tenaga kerja yang telah di bina di sector formal dan informal.
- 8) Kegiatan Pengembangan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan dana sebesar Rp.285.000.000,- realisasi Rp. 269.529.000,-



(94,57%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pelatihan melalui penerapan TTG dengan output terlatihnya masyarakat pencari kerja tentang Teknologi Tepat Guna sebanyak 60 orang dan dilaksanakan di Kab. Bungo dan Kota Jambi sebanyak 3 paket. Setelah pelatihan peserta 60 orang diberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi pencari kerja.

- 9) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan dana Rp.53.005.400,-dengan realisasi Rp. 19.985.400,- (37,70%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pembayaran honorarium pengelola data, analisa data, pengolah IPK Kabupaten/Kota dengan output tersedianya data IPK untuk 12 bulan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini tersedianya data IPK yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi pasar kerja. hal ini di sebabkan Karena Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

### 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP dan Bimtek Survey KHL dan Pengupahan (UMP); Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit; Pelaksanaan Program PBTA dalam rangka implementasi RAD PBPTA, Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



Tahun 2016 dan Pengujian Lingkungan Tenaga Kerja. Outcome yang diharapkan dari program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ini adalah 1) meningkatnya peran kelembagaan perlindungan ketenaga kerjaan dalam mendorong partisipasi aktif tenaga kerja dan dunia usaha dan 2) meningkatkan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha.

Untuk menjalankan program ini telah dianggarkan dana APBD Provinsi Jambi tahun 2016 sebesar Rp.595.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.458.334.248,- (77,03%) dengan realisasi fisik 77,03%. Secara rinci kegiatan yang dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2016 dan pengujian lingkungan kerjadengan dana Rp. 125.000.000,- dengan realisasi Rp. 91.235.329,- (72,99%) dengan realisasi fisik 72,99%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan/narasumber/instruktur, penyediaan ATK, transportasi dan perjalanan dinas. Sedangkan output utama dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bulan K3 Tahun 2016 dan Pengujian Lingkungan kerja. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat pekerja/buruh dan perusahaan dalam mengimplementasikan K3 dalam lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja. hal ini di sebabkan Karena Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

- 2) Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dengan dana Rp.80.000.000,- dengan realisasi Rp.54.096.000,- (67,62%) dengan realisasi fisik 67,62 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya perusahaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengawasan dan pengujian Target 80 perusahaan.
- 3) Kegiatan Pembahasan dan survey kebutuhan layak (KHL) serta UMP & Bimtek survey KHL dan pengupahan UMP dengan dana Rp.170.000.000,- dengan realisasi Rp.161.595.019,- (95,06%) dengan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya pembahasan dan survey KHL dan UMP serta terlaksananya Bimtek survey KHL dan pengupahan UMP sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 24 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya data KHL dan bahan penetapan UMP tahun 2016 serta meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek survey KHL dan pengupahan UMP dibidang Hubungan Industrial.
- 4) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dengan dana Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp.98.664.900,- (98,66%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium kelompok kerja Tripartit, instruktur, ATK, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya mekanisme lembaga kerjasama tripartit yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha (perusahaan) selama tahun 2016.

- 5) Kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan dana Rp. 120.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.743.000,- (43,95%) dengan realisasi fisik 43,95%. Kegiatan tidak terlaksana hal ini disebabkan Karena Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

### 3) Bidang Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah/kawasan di Provinsi Jambi, meningkatkan keberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi dan masyarakat di kawasan terpadu mandiri (KTM) serta penyiapan areal transmigrasi yang potensial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program dan kegiatan di lokasi transmigrasi dan KTM diarahkan kepada penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi. Pada tahun anggaran 2016, kegiatan ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui APBD Provinsi Jambi sebanyak 1 program dan 14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 874.900.000,-. Dari anggaran yang disediakan untuk kegiatan ketransmigrasian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 telah terealisasi mencapai Rp. 671.764.771,- atau sebesar 76,78% dengan realisasi fisik sebesar 80 %, karena ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigrasi dan Peternakan. Guna mendukung kegiatan pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan di lokasi transmigrasi tahun 2016, disediakan anggaran sebesar

Rp. 72.875.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan populasi ternak masyarakat transmigrasi. Penyerapan anggaran kegiatan ini hanya mencapai sebesar Rp. 22.099.000,- atau (30.32%), hal ini Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

#### **1. Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten dan peralatan pustu.**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi transmigrasi melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan, dilaksanakan kegiatan pengendalian obat di gudang farmasi kabupaten. Melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat akan mempermudah petugas kesehatan memberikan layanan sesuai standar pelayanan kesehatan melalui Pustu. Kegiatan ini menyediakan anggaran sebesar Rp. 43.392.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp.43.389.200,- atau 99,99 % dengan realisasi fisik 100%.

#### **2. Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi.**

Dalam rangka mereduksi timbulnya permasalahan di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan upaya preventif melalui pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut dengan melebur dan menghilangkan dikotomi kultur antara sesama warga transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar lokasi transmigrasi. Selain upaya preventif, upaya membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di lokasi transmigrasi seperti pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; merupakan sarana

untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dengan melaksanakan pertemuan berkala semua pemangku kepentingan akan dapat mengeliminir timbulnya permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat dan damai. Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp.44.131.200,- atau 88,26 % dengan realisasi fisik 88,26%.

### **3. Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama antar Daerah.**

Potensi di lokasi transmigrasi yang belum diolah merupakan sumberdaya yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut dibutuhkan investor yang mau menanamkan modalnya. Guna menarik minat investor perlu dilakukan promosi potensi yang ada di lokasi transmigrasi. Kegiatan promosi potensi kawasan transmigrasi disediakan dana sebesar Rp. 80.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membiayai promosi melalui media massa dan mengikuti event-event promosi. Selain itu membangun jaringan kerjasama antar daerah pengelola transmigrasi dan daerah lain diharapkan mampu menarik minat investor di lokasi transmigrasi. Realisasi kegiatan ini mencapai Rp. 46.390.000,- atau sebesar 57,99 % dengan realisasi fisik 57,99%. hal ini Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

### **4. Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT.**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi lokal, perlu diberikan

penguatan keahlian sumberdaya manusia melalui pelatihan home industri. Pelatihan diberikan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku, nilai tambah produk dan pemasaran produk. Untuk menyelenggarakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 90.760.000,-, dan telah terserap sebesar Rp.87.763.400,- atau 96,70 % dengan realisasi fisik 100%.

#### **5. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT.**

Derajat kesehatan masyarakat di lokasi transmigrasi perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh akan tujuan program transmigrasi dapat tercapai. Derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh perilaku, budaya, kondisi lingkungan dan pola konsumsi dan gizi masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2016, kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, lingkungan dan gizi berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara lengkap dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, petugas medis dan peralatannya. Selain itu upaya penyehatan lingkungan pemukiman transmigrasi dan peningkatan gizi masyarakat akan mengurangi kasus kesehatan yang dialami masyarakat. Mendukung kegiatan ini telah disediakan dana sebesar Rp. 149.985.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.149.648.950,- atau mencapai 99,78 % dengan realisasi fisik 100%.

#### **6. Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi.**

Untuk mengeliminir timbulnya konflik batas wilayah kawasan transmigrasi dengan masyarakat maupun pengusaha di sekitar kawasan transmigrasi, perlu ditetapkan batas definitif kawasan transmigrasi. Penetapan batas definitif tersebut selain tertuang dalam peta juga mempunyai batas yang jelas di lapangan yang dapat diketahui secara akurat. Oleh karena itu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya sehingga hasil penetapan dapat disepakati dan diterima. Penetapan batas dilakukan

tidak saja sebelum penetapan kawasan transmigrasi, namun juga dilaksanakan bagi kawasan transmigrasi yang belum memiliki batas-batas yang kongkrit. Kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp.180.000.000,-, dan telah terserap sebesar Rp. 128.931.621,- atau 71,63%. hal ini Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

**7. Kegiatan Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS.**

Untuk menjaga agar proses pembangunan pemukiman dan STP transmigrasi berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun, perlu dilakukan monitoring secara berkala. Untuk kegiatan monitoring ini disediakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.810.000,- atau mencapai 55,13 % dari anggaran yang tersedia. hal ini Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

**8. Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di UPT.**

Pembinaan kepada peserta transmigrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi usaha tani, keterampilan, penguasaan teknologi, pengorganisasian masyarakat, pembangunan jejaring kerja dan pembinaan mental spiritual. Pembinaan mental dan spiritual memiliki arti penting guna membangun rasa bersyukur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu



pembinaan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi diantara sesama peserta transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar kawasan transmigrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang dibutuhkan masyarakat transmigran di UPT Target 3 PKT Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 125.948.000,-. Sampai akhir tahun 2016 dana yang terserap untuk kegiatan ini mencapai Rp. 124.601.400,- atau sebesar 98,93 % dengan realisasi fisik 100%.

#### 9. Kegiatan Monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Sasaran (outcome) terwujudnya peningkatan perkembangan Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dialokasikan dana melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 36.940.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %, dengan realisasi fisik 0%. Kegiatan tidak di laksanakan hal ini Rasionalisasi Anggaran dan Save Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016. Kemudian baru di buka kembali tanggal 2 November 2016 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

Untuk menentukan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja SKPD Tahun 2018 berdasarkan RKPD Tahun 2018, maka dapat di riview dari rencana target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Sosnakertrans Tahun 2016-2021.

Berikut disajikan tabel target dan rencana kinerja tahun 2017 pada Bidang/UPTD/Sekretariat pada Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, yang diuraikan pada tabel berikut :



**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2017  
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**BIDANG PPTKP**

**TARGET SASARAN : PENEMPATAN TENAGA KERJA**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran</b>	<b>Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja</b>	<b>25%</b>
1	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	1 Jumlah peserta yang terdaftar yang ditempatkan	1,000 org
		2 Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	3,000 org
		3 Jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) bagi Tenaga Perawat dan Perawat Lansia yang memperoleh pengetahuan	100 org
2	Terwujudnya peningkatan pengetahuan stake holder dalam mekanisme penempatan ketenagakerjaan	4 Jumlah Pengusaha Pengguna Tenaga Kerja yang memperoleh pengetahuan dalam bidang penempatan	30 org
3	Tersedianya dokumen laporan tentang Informasi Pasar Kerja di Provinsi Jambi	5 Jumlah dokumen laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	200 Buku
4	Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi dalam perluasan kesempatan kerja	6 Jumlah Rapat Teknis Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan selama 1 tahun	1 kali

**TARGET SASARAN : PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja</b>	<b>Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja</b>	<b>25%</b>
1	Terwujudnya pembentukan WUB dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja	1 Jumlah Kelompok Wirausaha Baru (WUB) yang terbentuk	40 org
2	Terwujudnya perkembangan kelompok usaha dalam masyarakat	2 Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring sektor usaha informal	1 dok
3	Terwujudnya peningkatan pendapatan pekerja dalam memanfaatkan penggunaan teknologi yang lebih produktif dan efisien	3 Jumlah masyarakat yang memperoleh pengembangan usaha melalui Tekonologi Tepat Guna (TTG) berupa bantuan pelatihan dan peralatan kerja (Tolkit)	40 org
4	Terwujudnya kemandirian tenaga kerja sarjana dalam penciptaan kesempatan kerja	4 Jumlah TKS yang di dayagunakan dalam sektor usaha	12 org

**TARGET SASARAN : PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik</b>	<b>2,3%</b>
1	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas	1 Jumlah calon wirausaha yang memperoleh bekal keterampilan yang produktif	180 org
2	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha	2 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan produktivitas	120 org
3	Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri	3 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh program magang ke perusahaan dalam dan luar negeri	240 org
		4 Jumlah Calon peserta magang dan tenaga kerja yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing	40 org
4	Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja	5 Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh sertifikasi kompetensi kerja	64 org

**BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAN  
DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**TARGET SASARAN : PENERAPAN SMK3 DAN K3**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja</b>	<b>Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha</b>	<b>60 %</b>
1	Terwujudnya peningkatan penerapan K3 bagi perusahaan yang mempekerjakan para tenaga kerja	1 Jumlah paket kegiatan bulan K3 dan perusahaan yang diberi penghargaan 2 Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan K3 Umum di Perusahaan	1 Pkt 30 org
2	Terwujudnya kesadaran perusahaan terhadap resiko mempekerjakan Anak	3 Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi PBPTA	20 org
3	Terwujudnya pengetahuan perusahaan terhadap norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan	4 Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi dan dilakukan pengawasan terhadap penerapan Norma-norma ketenagakerjaan	120 prshn
4	Terwujudnya kualitas uji peralatan di perusahaan	5 Jumlah perusahaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengawasan dan pengujian	1 paket

**TARGET SASARAN : PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha	100 %
1	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja	1 Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan	2 kasus

**TARGET SASARAN : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya ketersediaan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja	Terwujudnya Peningkatan Kepersertaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	3,5%
1	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1 Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan program Perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka mendorong terwujudnya pemberian jaminan sosial	11 Kab dan Kota

<b>II</b>	<b>Terwujudnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Terwujudnya peningkatan hubungan yang harmonis, ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja</b>	<b>3,5%</b>
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Pekerja	1 Jumlah UMP yang diberlakukan pada Tahun 2017	1 Paket
2	Terwujudnya penyelesaian kasus-kasus Hubungan Industrial melalui penyelesaian bersama	2 Jumlah Lembaga Kerjasama yang diberdayakan	1 Paket

### RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2017 BIDANG TRANSMIGRASI

#### TARGET SASARAN : PENEMPATAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ Ditempati warga transmigran yang kondusif</b>	<b>Terwujudnya ketenangan dan kenyamanan warga transmigran dan lingkungan di permukiman transmigrasi</b>	<b>60%</b>
1	Tersedianya cadangan areal yang disediakan	1 Jumlah dokumen areal transmigrasi yang direncanakan	2 pkt
2	Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi	2 Jumlah wilayah yang dilakukan monitoring dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi	1 UPT
3	Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi	3 Jumlah calon lokasi permukiman transmigrasi yang akan dibangun	1 pkt
<b>II</b>	<b>Terwujudnya Kesejahteraan Warga Tansmigran</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pemberdayaan ekonomi pada kawasan UPT dan KTM serta penyiapan areal trasmigrasi</b>	<b>65%</b>

## Rencana Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2018

1	Terwujudnya keserasian dan keselarasan hidup warga transmigran	1	Jumlah pembinaan yang dilakukan pada UPT yang ditempati warga transmigran	1	UPT
2	Terwujudnya penyelesaian kasus dan permasalahan yang terjadi di lokasi transmigrasi	2	Jumlah permasalahan yang ditangani di lokasi UPT	1	UPT
3	Terwujudnya kesehatan masyarakat dan Lingkungan serta gizi keluarga transmigran di UPT	3	Jumlah UPT yang memperoleh layanan kesehatan dan kesehatan lainnya	1	UPT
		4	Jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diperuntukan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat transmigran	1	UPT
4	Terwujudnya peningkatan pendapatan warga transmigrans di UPT Bina melalui pengembangan sektor yang produktif	5	Jumlah masyarakat transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan produksi petani dan peternakan	1	UPT
5	Terwujudnya peningkatan ekonomi warga transmigrans di UPT Bina melalui usaha rumah tangga yang lebih produktif	6	Jumlah UPT Binaan yang mendapatkan bimbingan pengembangan ekonomi melalui home industri	1	UPT
<b>III</b>	<b>Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat</b>	<b>Penyediaan informasi dan promosi dalam Bidang Ketramigrasian</b>			
1	Tersedianya informasi perkembangan pemukiman transmigrasi di Provinsi Jambi	1	Meningkatnya informasi UPT melalui publikasi potensi dilokasi UPT	1	Paket
2	Tersedianya informasi dan promosi pembangunan wilayah transmigrasi yang ada	2	Tersedianya informasi perkembangan pembangunan dalam bidang ketramigrasian ditingkat nasional di Jakarta	1	Pkt

**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2017  
UPTD BPTT DINAS NAKERTRANS  
TARGET SASARAN : PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pelatihan bagi tenaga kerja</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik</b>	<b>100 %</b>
1	Terwujudnya peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	1 Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja	204 org
2	Terwujudnya peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	2 Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja melalui Mobil Training Unit (MTU)	48 org



# RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DINAS

## TARGET SASARAN : PENINGKATAN PELAYANAN APARATUR

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien serta berdayaguna dalam rangka menunjang pelayanan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam menunjang kinerja organisasi	100 %
1	Terwujud pelayanan dan pengolahan Surat Menyurat	1 Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	300 lbr
2	Terwujudnya penyelesaian pembayaran pembebanan rekening air, listrik dan telepon Kantor	2 Jumlah kebutuhan rekening fasilitas kantor yang diselesaikan	3 paket
3	Terwujudnya pengelolaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan	3 Jumlah personil yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan	14 org
4	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor dan tempat kerja	4 Jumlah personil yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan kantor dan lingkungan tempat kerja	1 paket
5	Terwujudnya ketersediaan ATK sebagai peralatan kerja	5 Banyaknya Alat Tulis Kantor yang disediakan	4 Trw
6	Tersedianya Bahan habis pakai dan penggandaan	6 Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan selama 1 tahun	13 jenis
7	Tersedianya Bahan habis pakai komponen listrik	7 Jumlah Komponen dan peralatan listrik dan elektronik yang dibutuhkan selama 1 tahun	1 paket
8	Tersedianya Bahan-bahan bacaan pada perpustakaan kantor	8 Jumlah bahan bacaan yang disediakan dalam perpustakaan kantor	1 paket

## Rencana Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2018

9	Tersedianya Kebutuhan makan dan minum tamu	9	Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka kebutuhan Rapat-rapat dalam kantor	4	trw
10	Terwujudnya sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan bidang terkait	10	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	1	paket
<b>II</b>	<b>Terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pelayanan</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam menunjang pelayanan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
1	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	1	Jumlah Bangunan Kantor Lab. Bahasa yang dibangun	1	unit
2	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Unit
3	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	3	Jumlah meubeleur yang disediakan	14	buah
4	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	4	Jumlah komputer yang disediakan	4	unit
5	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	5	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara dan diperbaiki	2	paket
6	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	6	Jumlah Kendaraan dinas yang dilakukan perawatan dan diperbaiki	20	unit
7	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	7	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan diperbaiki	38	unit
<b>III</b>	<b>Terwujudnya motivasi kerja aparatur dalam memberikan pelayanan</b>	<b>Meningkatnya dorongan dan disiplin aparatur dalam menunjang pelayanan yang lebih optimal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
1	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	1	Jumlah pakaian kerja yang disediakan bagi aparatur sipil negara	200	stell
<b>IV</b>	<b>Terwujudnya pengetahuan aparatur dalam meningkatkan pelayanan</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan aparatur	1	Jumlah pelayanan adm. Kepegawaian dan keikutsertaan aparatur dalam kegiatan pelatihan dan kursus singkat di luar kantor	3	keg

V	Terwujudnya kinerja pelayanan dalam pengelolaan pelaporan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyusunan data laporan kinerja organisasi	100 %
1	Terwujudnya pengelolaan laporan organisasi	1 Jumlah Laporan yang disiapkan selama 1 tahun	5 lap

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### a. Tujuan

Telaahan terhadap kebijakan nasional bertujuan untuk mensinergikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian. Hal ini dimaksudkan agar arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah dapat diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian akan lebih memudahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pengimplementasiannya secara berkesinambungan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.

#### b. Agenda Rencana Pembangunan Nasional

Penyelenggaran pembangunan nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses pembangunan daerah, dimana daerah merupakan wilayah otonomi yang diberikan amanat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI, hal ini sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

### c. Sembilan Agenda Prioritas Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara nasional masih ditemui terjadinya ketimpangan pembangunan diberbagai daerah, hal ini ditandai dengan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah (a) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan (b) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*), serta (c) penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial.

Selain itu memasuki MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat

tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja akan menjadi aset berharga untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan.

Bagi daerah, kesiapan dalam menghadapi MEA 2015 berbagai hal harus terus diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi kesiapan menghadapi berbagai hambatan, tantangan maupun peluang bagi daerah, terutama dari sektor ketenagakerjaan. Dalam program prioritas yang sudah dan tentunya masih akan dilakukan oleh Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi ke depan dalam menghadapi kondisi ini, akan mempersiapkan tenaga kerja ahli yang bersertifikasi, menciptakan wirausahawan yang tangguh dan kompetensi tenaga kerja yang lebih handal, serta pemantaan Teknologi Tepat Guna (TTG), selain itu meningkatkan aksesibilitas lembaga pelatihan pemerintah (BLK) dalam mempersiapkan pencari kerja di berbagai kejuruan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

#### **d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional**

1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi:  
(i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan **pengurangan kesenjangan antar wilayah**; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; **(iii) peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan penerapan pola**

produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

2. **Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial**, melalui strategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (ii) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (iii) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisontal dan rendahnya tingkat kriminalitas; (iv) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (v) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indeks demokrasi); (vi) dan pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. **Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup**, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) penurunan emisi GRK); (iii) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. **Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.**

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

### Integrasi Isu-isu strategis ke dalam RPJMD Tahun 2016-2021

### 1) Isu Global

- a. Asean Economic Community 2015
- b. AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
- c. SDGs
- d. Perubahan iklim

### 2) Isu Nasional

- a. Pembangunan Dan Perdagangan Nasional Serta Regional
- b. Kedaulatan Pangan Dan Energi
- c. Membangun Dari Desa
- d. Poros Maritim Dunia
- e. Kemiskinan
- f. Revolusi Mental
- g. Isu Regional



### 3) Isu Regional

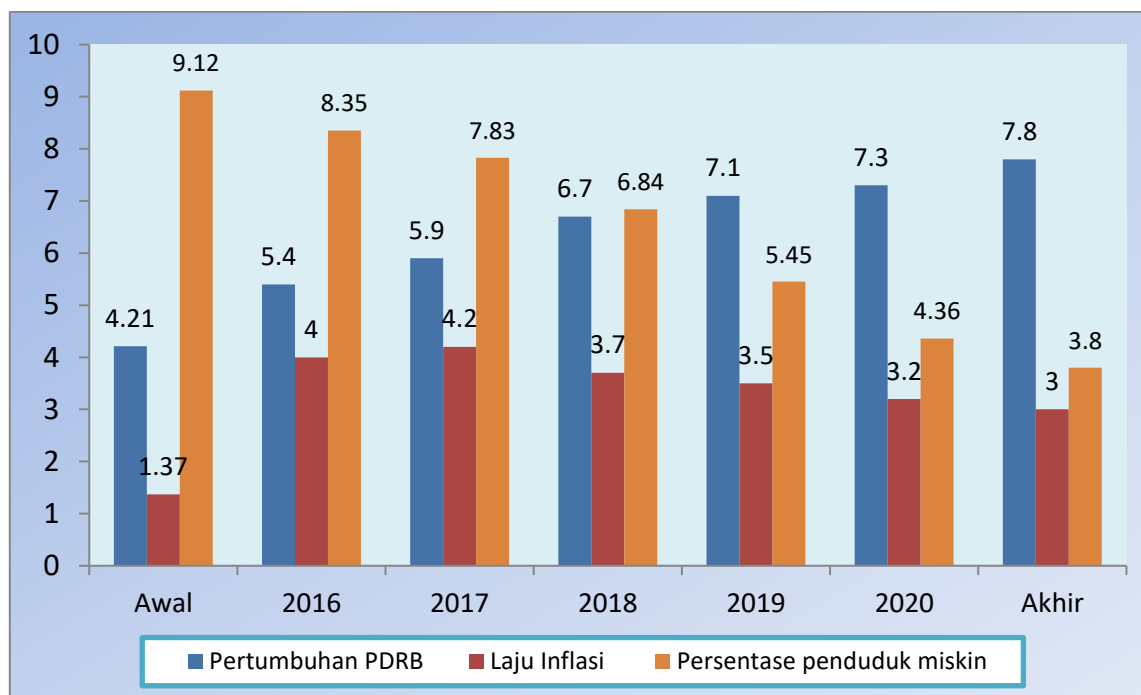
- a. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Prov. Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar
- b. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
- c. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi
- d. Pemberdayaan masyarakat penyangga, TNB, TNBT dan TNKS.
- e. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi
- f. Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat
- g. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur.

### 4) Isu Daerah



- a. Tata kelola pemerintahan
- b. Daya saing SDM
- c. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
- d. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
- e. Kesejahteraan masyarakat

### 3. Sasaran Pembangunan Nasional untuk Provinsi Jambi



### 4. Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, dengan 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya

3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tahun 2016-2021 merupakan pembangunan jangka panjang tahap ke tiga, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJP-D Provinsi Jambi, maka sasaran pada tahap ke tiga ini adalah :

1. Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ;
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta
3. perkembangan penerapan IPTEK

Dalam penjabaran visi RPJD-D tahap ketiga, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 misi yang menjadi sasaran prioritas Pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021, yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya
3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan Good Government dan Demographic Government.

## 5. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

### a. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi

implementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,  
TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**

**"JAMBI TUNTAS 2021"**

Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

VISI	URAIAN VISI
<b>PROVINSI JAMBI YANG TERTIB</b>	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
<b>PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL</b>	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
<b>PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN</b>	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif
<b>PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH</b>	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
<b>PROVINSI JAMBI YANG ADIL</b>	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah
<b>PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA</b>	

Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

**b. Misi**

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.

**7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Provinsi Jambi 2018**

**Visi SKPD**

**" Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021 "**

Makna dari pernyataan "Visi" tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di

harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akan berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa ketransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigasi.

**a. Pernyataan Misi**

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1** : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- e. **Misi 2** : Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. **Misi 3** : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.

g. **Misi 4** : Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

## 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

### a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

#### 2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- e. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- f. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- g. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- h. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- i. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- j. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.

- k. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- l. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- m. Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

**2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketransmigrasian, antara lain :**

- a. Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- b. Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- c. Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- d. Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

**b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

**1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :**

- a. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja.



- b. Terwujudnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pencari kerja yang memiliki kompetensi.
- c. Terwujudnya ketersediaan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja
- l. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja
- m. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

**2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :**

- a. Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif.
- b. Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran
- c. Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi
- d. Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tujuan, Strategi, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b>			
<b>MISI SKPD ke I : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja</b>			
Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan upaya-upaya efektif dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui pengembangan mekanisme penempatan tenaga kerja.</li> <li>Peningkatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh pencari kerja</li> <li>Mendorong sektor terkait dalam penyerapan tenaga kerja melalui koordinasi lintas K/L dan Stake holder.</li> <li>Mengembangkan skema yang efektif dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>
<b>MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b>			

**MISI SKPD ke II : Mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja**

Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pencari kerja yang memiliki kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatkan kapasitas BLK dalam penyelenggaraan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat.</li> <li>• Peningkatan kompetensi instruktur dan peserta pelatihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses informasi pelatihan secara luas.</li> <li>• Merencanakan jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</li> <li>• Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, baik swasta, masyarakat maupun perguruan tinggi.</li> <li>• Meningkatkan fasilitas penunjang pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan global.</li> </ul>
Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat	Terwujudnya peluang kerja bagi pencari kerja	Peningkatan sumber daya dan potensi lokal masyarakat yang ada untuk dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi guna membuka kesempatan kerja	Menyiapkan skema pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.
Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan	Peningkatan kemampuan kewirausahaan dalam	Memberikan pola keterampilan dengan model

Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan	keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas	upaya mendorong daya saing produk	kewirausahaan yang berkualitas dan memenuhi standar
Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat	Menggali sumber-sumber usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam model pelatihan
Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terwujudnya peningkatan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga	Peningkatan keterpaduan program pelatihan yang dapat membuka peluang kerja	Memberikan bantuan program kerjasama dalam pengembangan lembaga pelatihan swasta
Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja	Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri	Pembekalan bagi calon peserta magang ke luar negeri dan dalam negeri melalui seleksi, sosialisasi dan pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan formasi dan kebutuhan peserta magang yang dibutuhkan.</li> <li>• Menyiapkan skema pembiayaan bagi peserta magang ke luar negeri</li> <li>• Membangun Pusat Laboratorium Pelatihan Bahasa Asing (Inggris, Korea, Jepang dan Arab)</li> </ul>
Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Terwujudnya lembaga pelatihan yang terakreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan	Peningkatan kompetensi lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan program pelatihan	Memberikan kemudahan bagi lembaga pelatihan kerja dalam proses akreditasi sesuai yang dipersyaratkan

		yang sesuai dengan kebutuhan.	
Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja	Terwujudnya pengelola dan instruktur pelatihan yang berkualitas dan professional	Penguatan kapasitas SDM yang berkualitas dalam menyelenggarakan program pelatihan kerja	Melakukan upgrading sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki
Meningkatkan Kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja	Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja	Peningkatan peluang kerja yang memenuhi standarisasi pasar MEA yang kompetitif	Membuka kesempatan bagi instruktur dan tenaga kerja untuk dilakukan uji kompetensi secara bertahap setiap tahunnya.
<b>MISI SKPD ke III : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif</b>			
Meningkatkan Peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Penguatan Peran Lembaga Perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka mendorong terwujudnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang seadil-adilnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kemudahan bagi tenaga kerja dalam memperoleh akses pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.</li> <li>• Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga perlindungan sosial ketenagakerjaan</li> </ul>
Meningkatkan ketenagakerjaan bekerja dan berusaha bagi	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan bagi perusahaan</li> </ul>

tenaga kerja dan perusahaan		dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pekerja terburuk anak, aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan persyaratan ketenagakerjaan lainnya	dalam penerapan SMK3. • Mensosialisasikan sanksi hukum bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.
Meningkatkan Penerapan Norma-norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja	Penerapan Norma-norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan secara konsisten guna pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan untuk mencegah terjadinya kasus hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan sosialisasi dan Per-UU dalam bidang ketenagakerjaan secara efektif.</li> <li>• Mengumpulkan bahan kebijakan yang diperlukan dalam penentuan skala upah.</li> </ul>
<b>MISI SKPD KE IV : Mendorong pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi sebagai kawasan pengembangan ekonomi antar kota dan desa</b>			
Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa	Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif	Peningkatan potensi desa yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi	Memperluas akses penempatan transmigrasi ke lokasi-lokasi transmigrasi pengembangan
Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigran.	Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran	Peningkatan pemberdayaan usaha yang produktif sebagai penyanggah	Menyesuaikan jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan dan diberdayakan di lokasi UPT Bina

		ekonomi warga transmigrasi	
Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif	Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi	Percepatan pengembangan KTM sebagai pusat kawasan pertumbuhan	Mendorong sektor terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam merealisasikan percepatan pusat pertumbuhan KTM yang perlu dikembangkan
Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian	Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	Penyediaan informasi dan promosi dalam Bidang Ketransmigrasian	Mempromosikan perkembangan pembangunan wilayah transmigrasi melalui Transmigrasi Expo

### 3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

#### a. Ketenagakerjaan, yaitu

- Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota



- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
  - Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
  - Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
  - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
  - Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
  - Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
  - Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
  - Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
  - Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
  - Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- b. **Ketransmigrasian**, yaitu
- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
  - Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
  - Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
  - Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

**Strategi, Bidang Ketenagakerjaan** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :



- 1). Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :
  - Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
  - Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
  - Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
  - Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
  - Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
  - Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
  - Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
  - Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi
  - Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
  - Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
  - Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
  - Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
  - Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
  - Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  - Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
  - Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
  - Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

- Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kerja, dengan cara :
- Peningkatan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
  - Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
  - Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
  - Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
  - Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
  - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
  - Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
  - Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
  - Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.
- 3) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :
- a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;

- b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
  - c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
  - d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
  - e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
  - f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
- a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
  - b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
  - c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
  - d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
  - e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
  - b. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
  - c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.

- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
- e. Meminalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
- g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
- h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

**Strategi, Bidang Ketransmigrasian** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
  - a. Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada.
  - b. Meningkatkan jumlah UPT binaan yang melaksanakan kegiatan usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cocok dengan lokasi penempatan serta usaha home industri lainnya.
  - c. Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual warga transmigran dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat keberfungsian Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan kawasan

- 4) Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian, dengan cara mempromosikan perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi melalui transmigrasi expo.

**Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.

## BAB IV

**TARGET KINERJA, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN KERANGKA PENDANAAN**

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Jambi Tuntas 2016-2021 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan, yaitu 2 (dua) urusan wajib bidang sosial dan tenaga kerja serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigarian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Adapun Program-program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

**2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

**3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**6. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS**

**Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi.

**7. PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA**

**Program Pemberdayaan Tenaga Kerja**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

**8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN SDM TENAGA KERJA**

**Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase penurunan pelanggaran kasus norma tenaga kerja.

**9. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA**

**Program Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.

**10. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI**

**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan penempatan transmigran sesuai calon lokasi penempatan.

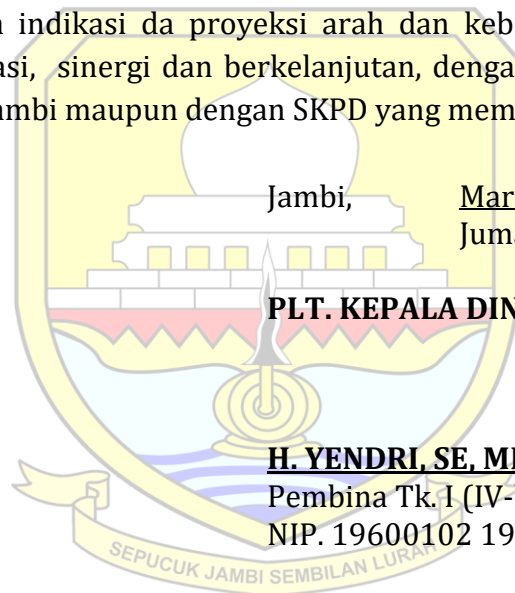


**BAB V**  
**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2018 ini, maka penetapan prioritas pembangunan SKPD tetap memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang menjadi kewenangannya, serta indikasi dan proyeksi arah dan kebijakan periode 5 tahun berikutnya, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.



Jambi,

Maret 2017

Jumadi Akhir 1438 H

**PLT. KEPALA DINAS,****H. YENDRI, SE, MM**

Pembina Tk. I (IV-b)

NIP. 19600102 198503 1 010